

Katalog : 4102004.3217

2023

Kabupaten Bandung Barat

Indikator Kesejahteraan Rakyat



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat
BPS-Statistics of Bandung Barat Regency

2023

Kabupaten Bandung Barat

**Indikator
Kesejahteraan
Rakyat**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat 2023

Nomor Publikasi : 32170.2327
Katalog : 4102004.3217

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x+45 halaman

NASKAH :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat

GAMBAR KULIT :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat

DITERBITKAN OLEH :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya.

Tim Penyusun

Pengarah : Ahmad Muhammad Saleh, S.E.

Penanggung Jawab : Deni Minarso, SST, M.E.

Naskah : Sely Yuniarti, S.Si., M.E.

Pengolah Data : Sely Yuniarti, S.Si., M.E.

Gambar Kulit : Sely Yuniarti, S.Si., M.E.

Penyunting : Deni Minarso, SST, M.E.

<https://bandungbratka.bps.go.id>

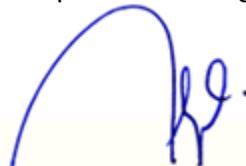
Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bandung Barat antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Proyeksi SP2010, SP2020 dan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurutdelapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan sarandemi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat



Ahmad Muhammad Saleh, S.E.

Daftar Isi

Halaman

	Kata Pengantar	iii
	Daftar Isi	iv
	Daftar Tabel	vi
	Daftar Grafik	vii
BAB I	Kependudukan	
	1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
	1.2 Kepadatan Penduduk	3
	1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan	4
	1.4 Fertilitas	6
	1.5 Status Perkawinan Wanita Usia Produktif	6
	1.6 Penggunaan Alat/Cara KB	8
BAB II	Kesehatan dan Gizi	
	2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	9
	2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	13
BAB III	Pendidikan	
	3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	14
	3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	16
	3.3 Tingkat Pendidikan	17
	3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM).....	19
BAB IV	Ketenagakerjaan	
	4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	23
BAB V	Taraf dan Pola Konsumsi	
	5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	30

BAB VI	Perumahan dan Lingkungan	
	6.1 Kualitas Rumah Tinggal	32
	6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	34
	6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	36
BAB VII	Kemiskinan	
	7.1 Perkembangan Penduduk Miskin	38
	7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	40
	7.3 Karakteristik Pendidikan	42
BAB VIII	Sosial Lainnya	
	8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	43

<https://bandungbaratkab.go.id>

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, 2022	19
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bandung Barat, 2022	20
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, di Kabupaten Bandung Barat, 2022	21
Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per kapita di Kabupaten Bandung Barat dalam (Rp), 2022	30

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>	
Grafik 1.1	Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023	2
Grafik 1.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2022	3
Grafik 1.3	Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2022	4
Grafik 1.4	Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Bandung Barat, 2017-2022	5
Grafik 1.5	Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun keatas menurut Status Perkawinan, 2022	7
Grafik 1.6	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Status Partisipasi KB untuk Menunda/Mencegah Kehamilan, Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022	8
Grafik 2.1	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bandung Barat, 2018-2022	10
Grafik 2.2	Persentase Angka Kesakitan di Kabupaten Bandung Barat, 2020-2022	11
Grafik 2.3	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, 2020-2022	12
Grafik 2.4	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan menurut Karakteristik dan Penolong Persalinan, 2021-2022	13
Grafik 3.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Bandung Barat, 2022	15
Grafik 3.2	Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Persen), 2022	16
Grafik 3.3	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung Barat (tahun), 2018-2022	17

Grafik 3.4	Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Barat, 2022	18
Grafik 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun keatas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2022	24
Grafik 4.2	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Wilayah di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2022	25
Grafik 4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021 dan 2022	26
Grafik 4.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021 dan 2022	27
Grafik 4.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021 dan 2022	28
Grafik 6.1	Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator-Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Bandung Barat, 2020	32
Grafik 6.2	Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Dinding Terluas, 2020	33
Grafik 6.3	Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2022	34
Grafik 6.4	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2022	36
Grafik 7.1	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2022 (ribu jiwa)	39
Grafik 7.2	Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	40
Grafik 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bandung Barat, 2018 - 2022	41
Grafik 7.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bandung Barat, 2018 - 2022	42

Grafik 8.1 Persentase Penduduk 5 Tahun keatas yang Menggunakan Telepon Seluler/Komputer dan Mengakses Internet di Kabupaten Bandung Barat, 2021-2022 44

<https://bandungbaratkab.bps.go.id>

1 Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun juga bisa menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan suatu negara. Masalah kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah dan negara.

Masalah yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

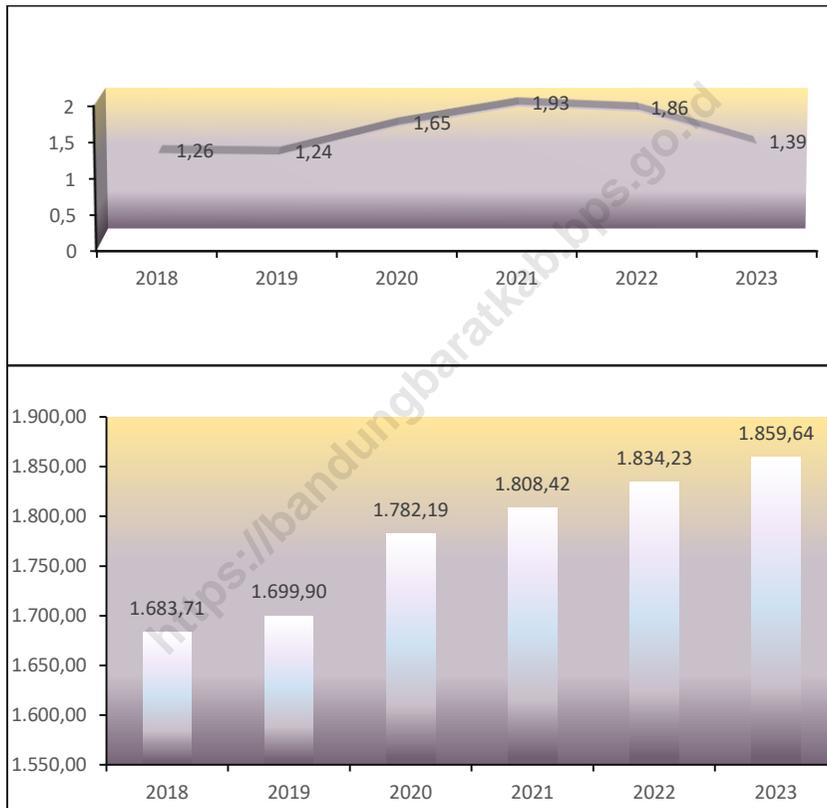
Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah. Penduduk Kabupaten Bandung Barat berjumlah 1,714 juta jiwa pada tahun 2020.

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Dengan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Sekarang saja yang bisa kita rasakan adalah dari sisi kemacetan lalu lintas, dengan jumlah penduduk 1.859,64 juta jiwa pada tahun 2023 (proyeksi tahun 2020) kemacetan merupakan suatu hal konkret yang akan dapat dengan mudah kita lihat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan

jumlah penduduk yang besar ini, Kabupaten Bandung Barat tentunya membutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung sebagai tindakan preventif dan penyelesaian terhadap masalah kemacetan yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023



Sumber: 2010-2019: Hasil Proyeksi SP2010, BPS; 2020-2023: Hasil Proyeksi SP2020

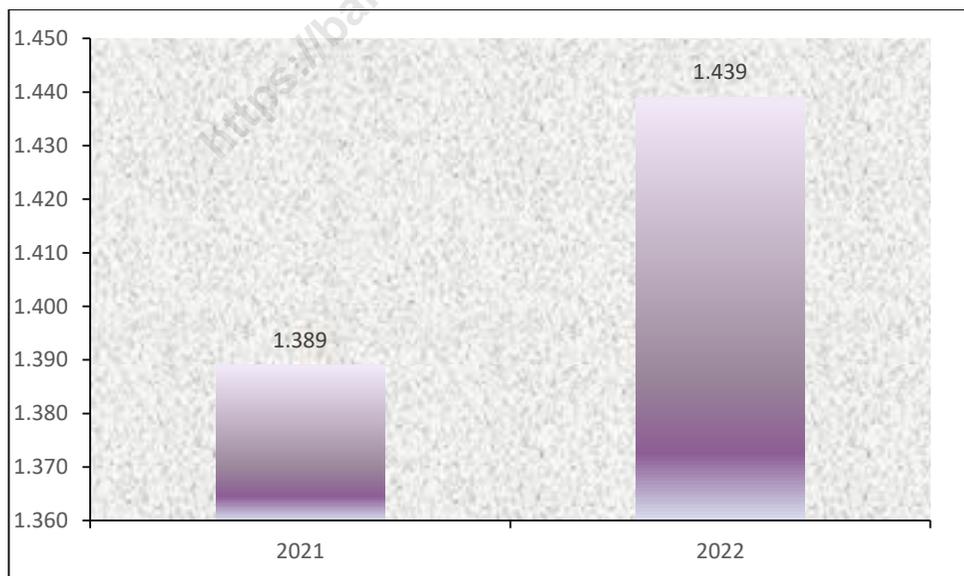
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 sebanyak 1.683,711 ribu jiwa terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 yaitu sebesar 10,45 persen atau dengan kata lain mengalami penambahan sebanyak 175,93 ribu jiwa.

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 hingga tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat sebesar 1,39 persen yang mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat sebesar 1,86. Hal ini menunjukkan bahwa trend perlambatan yang terjadi, merupakan dampak dari adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat dari tahun sebelumnya.

1.2 Kepadatan Penduduk

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.439 jiwa per km² sedangkan tahun 2021 sebesar 1.389 jiwa per km² atau naik sebesar 3,60 persen.

**Grafik 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2021-2022**



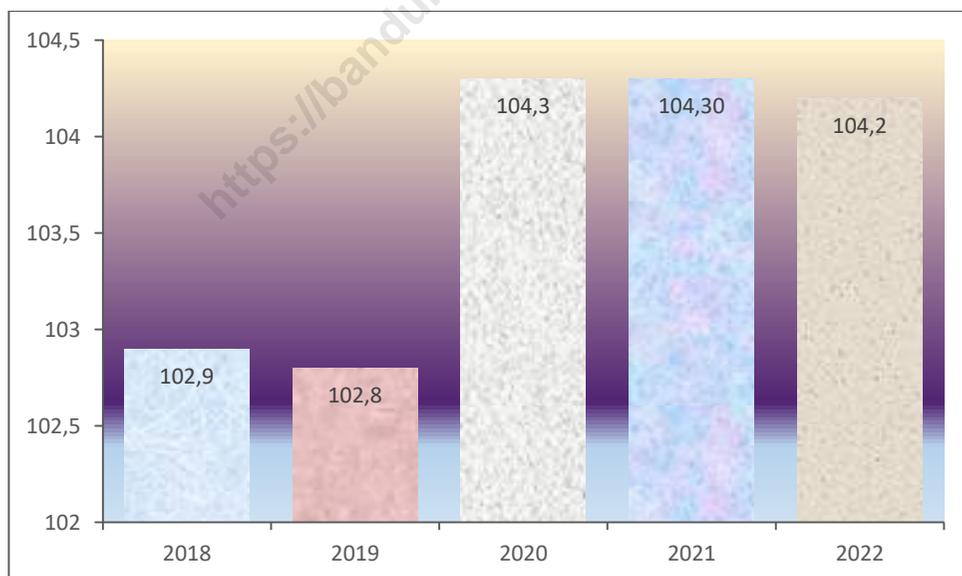
Sumber: 2010-2019: Hasil Proyeksi SP2010, BPS; 2020: Hasil Sensus Penduduk 2020; 2021-2022: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat jika dilihat dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2022 sebesar 104,2. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Grafik 1.3. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2022

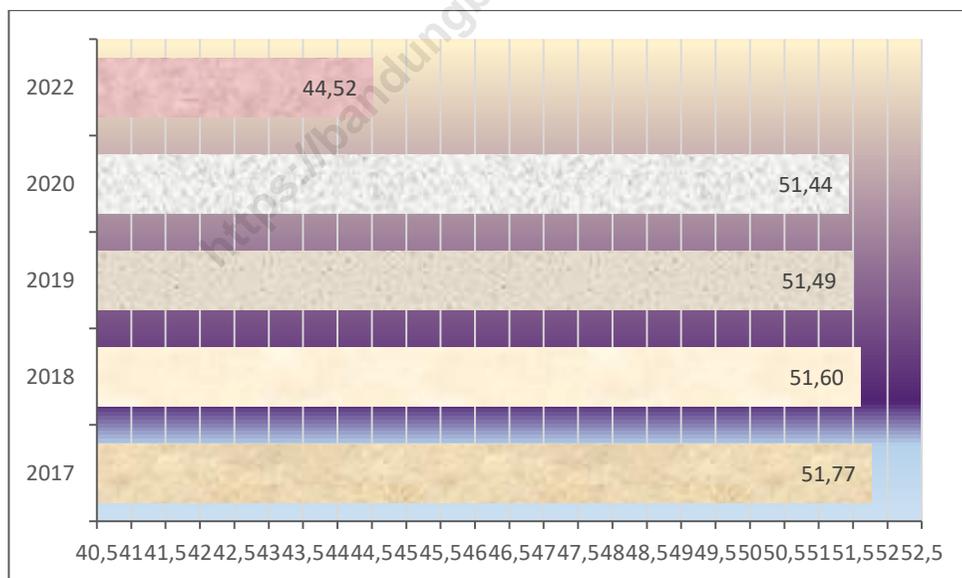


Sumber: 2010-2019: Hasil Proyeksi SP2010, BPS; 2020: Hasil Sensus Penduduk 2020; 2021-2022: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 sebesar 44,52. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah setempat.

Grafik 1.4. Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Bandung Barat, 2017-2022



Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk SP2010, BPS

1.4 Fertilitas

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Angka fertilitas yang tinggi bisa menyebabkan penambahan penduduk di suatu wilayah, ledakan jumlah penduduk akan terjadi apabila angka fertilitas yang tinggi tetapi angka mortalitas atau kematian yang rendah.

Menurut Ida Bagus Mantra (1985), terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan faktor-faktor non demografi. Faktor-faktor demografi antara lain struktur atau komposisi umur, status perkawinan, umur kawin pertama, keperidian atau fekunditas, dan proporsi penduduk yang kawin. Faktor-faktor non demografi antaranya keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas.

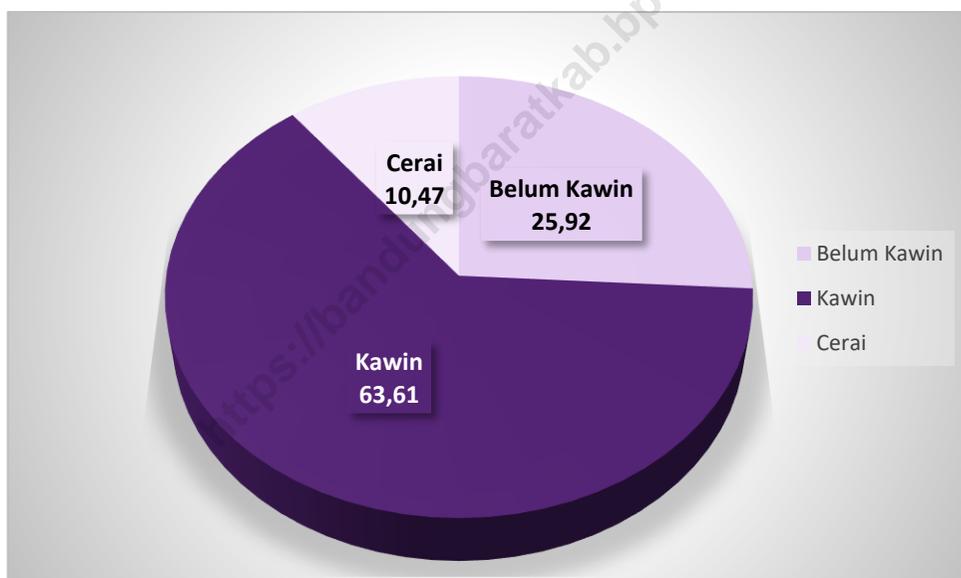
Indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas salah satunya adalah Angka Kelahiran Total (TFR). TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya, dan digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka menekan jumlah kelahiran di wilayah tersebut. Seperti halnya program KB yang sejak dulu sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka kelahiran serta meningkatkan rata-rata usia kawin, dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi.

1.5 Status Perkawinan Wanita Usia Produktif

Perkawinan pada usia produktif akan berpengaruh pada penambahan penduduk. Usia Kawin bisa dijadikan salah satu pemicu penambahan jumlah penduduk dimana semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi dimasa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Dengan tumbuhnya usia nikah semakin dewasa dapat menunjang keberhasilan program KB melalui menurunnya angka anak dilahirkan seorang ibu atau Angka kelahiran Total (TFR).

Grafik 1.5. Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun keatas menurut Status Perkawinan, 2022



Sumber: Susenas Maret 2022

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022, sebagian besar wanita produktif di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 63,61 persen berstatus kawin. Selain itu, persentase wanita yang belum kawin pun relatif besar jumlahnya yaitu sebesar 25,92 persen. Dengan banyaknya persentase wanita usia produktif yang belum kawin, maka diperlukan pendidikan dan pembinaan wanita usia pra-nikah dengan baik. Diharapkan pengetahuan

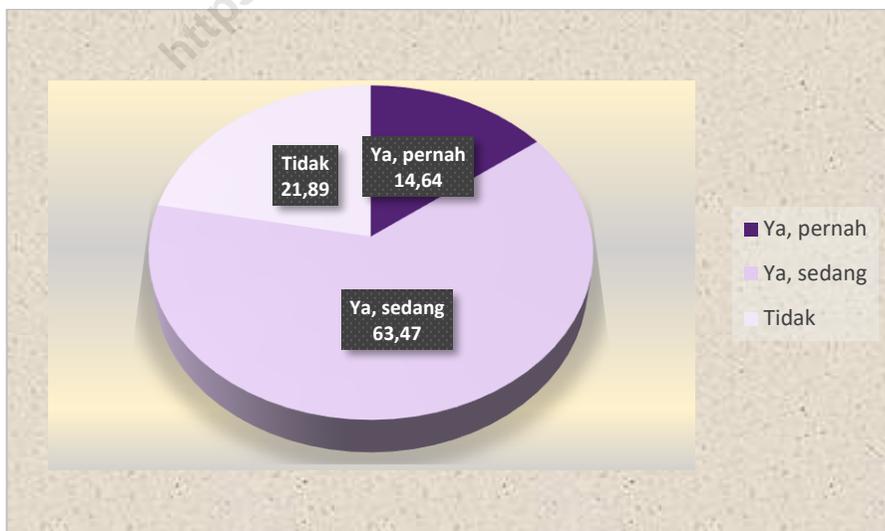
tentang perkawinan, persalinan dan pengasuhan anak dapat tergambar secara lebih baik. Sehingga ketika pada waktunya menikah, wanita tersebut telah memiliki pengetahuan yang baik terkait hal tersebut di atas. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada angka kematian bayi dan juga pada angka prevalensi stunting.

1.6 Penggunaan Alat/Cara KB

Pemerintah sudah sejak lama menggalakkan program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat, jumlah wanita usia produktif (15-49 tahun) yang pernah kawin dan sedang menggunakan alat KB sebanyak 63,47 persen. Sedangkan yang pernah menggunakan alat KB sebanyak 14,64 persen. Sisanya sebanyak 21,89 persen tidak atau belum pernah menggunakan alat KB.

Grafik 1.6. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Status Partisipasi KB untuk Menunda/Mencegah Kehamilan, Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022



Sumber: Susenas, Maret 2022

2 Kesehatan dan Gizi

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

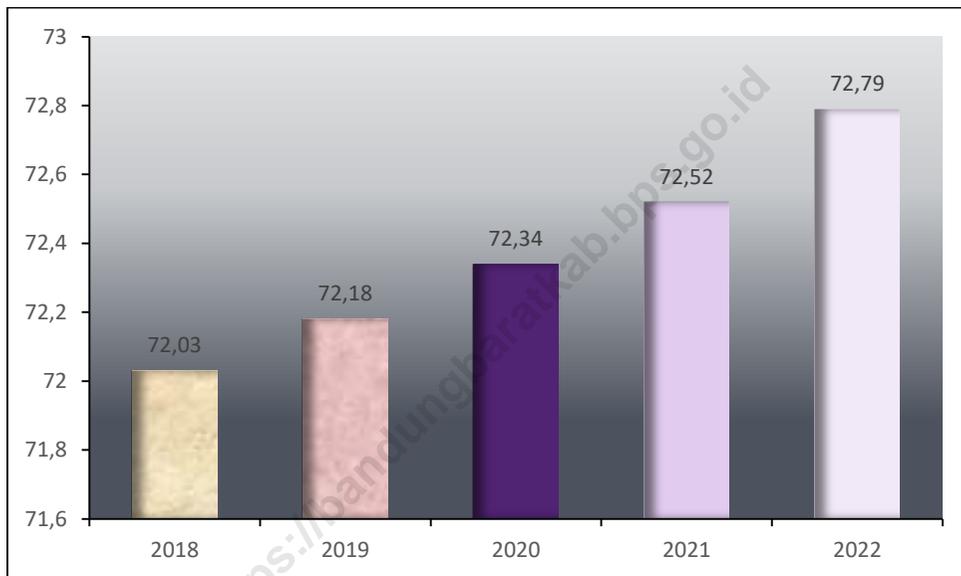
Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Salah satu dimensi kesehatan bisa dilihat dari Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2018 hingga 2022, Kabupaten Bandung Barat telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup sebesar 0,76 tahun. Pada tahun 2018, Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bandung Barat sebesar 72,03 tahun, dan pada tahun 2022 mencapai 72,79 tahun. Semakin meningkatnya umur harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Peningkatan umur harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Grafik 2.1. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018-2022

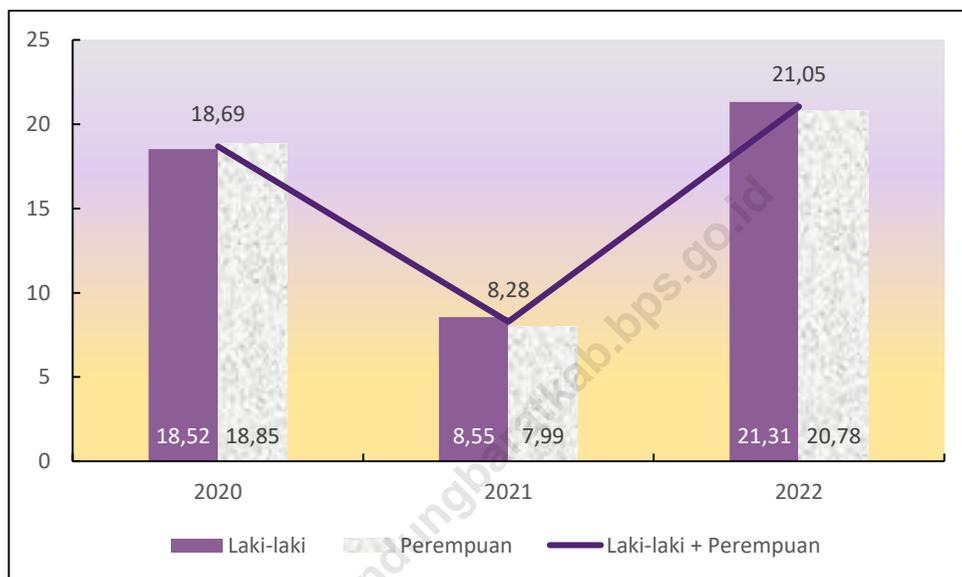


Sumber: IPM 2018-2022, BPS

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan

masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Grafik 2.2. Persentase Angka Kesakitan di Kabupaten Bandung Barat, 2020-2022



Sumber: Susenas, Maret 2020-2022

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022 persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 sebesar 21,05 persen sedangkan pada tahun 2021 sebesar 8,28 persen dan pada tahun 2020 sebesar 18,69 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase penduduk yang sakit pada tahun 2020 baik laki-laki maupun perempuan hampir sama besar. Penduduk laki-laki yang menderita sakit pada tahun 2022 sebesar 21,31 persen dan penduduk perempuan sebesar 20,78 persen.

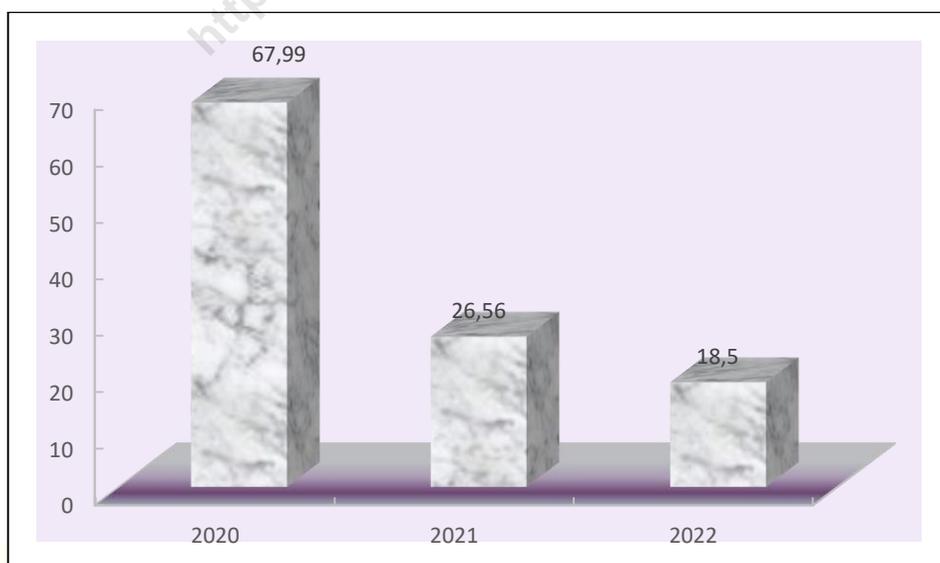
Ketika seseorang sakit, maka sudah tentu orang yang sakit tersebut akan mengoptimalkan ikhtiarnya untuk mengembalikan kesehatannya agar aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Berbagai ikhtiar dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai

keluhan kesehatan untuk mengembalikan kesehatannya salah satunya adalah dengan berobat jalan. Berobat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk

mendatangkan petugas kesehatan ke anggota rumah tangga. Akibat dari berobat jalan tentunya seorang yang memiliki keluhan kesehatan harus membayar biaya berobat jalan selama proses penyembuhannya.

Biaya berobat jalan bisa saja dibebankan secara mandiri kepada pasien atau bisa juga dengan menggunakan jaminan kesehatan. Pada tahun 2020 sampai 2022 persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan ketika berobat jalan mengalami tren penurunan. Pada tahun 2022 persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan ketika berobat jalan sebesar 18,50 persen menurun apabila dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 26,56 persen dan pada tahun 2020 sebesar 67,99 persen.

Grafik 2.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, 2020-2022



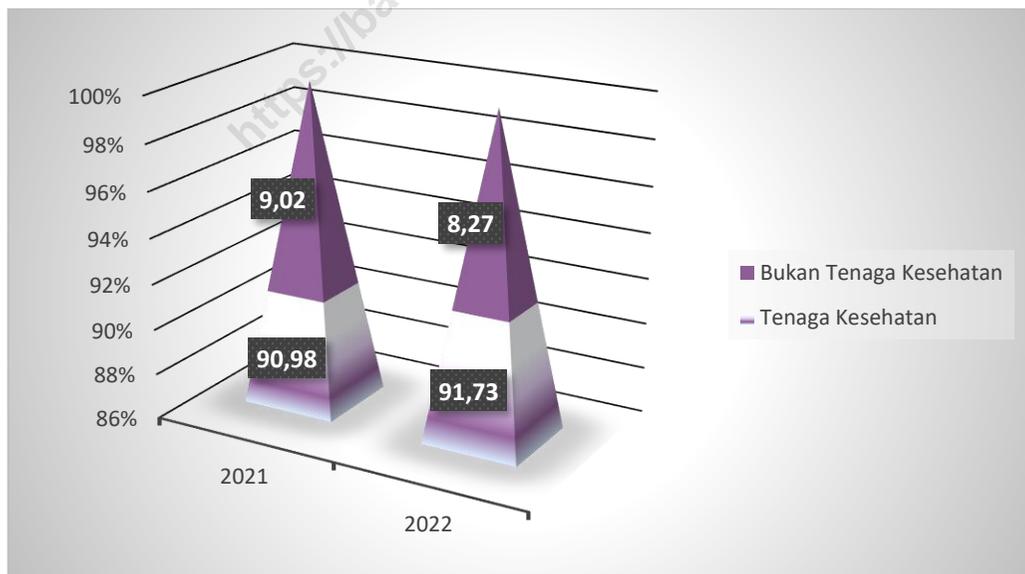
Sumber: Susenas, Maret 2020-2022

2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi fasilitas tenaga kesehatan sangatlah penting, tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangat penting yang bisa mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program-program kesehatan salah satunya melalui perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang tercantum pada Perpres No 5 tahun 2010.

Dari tahun 2021 sampai 2022 di Kabupaten Bandung Barat kesadaran akan pentingnya proses persalinan sebagai upaya awal untuk mengurangi tingkat kematian bayi sudah cukup baik bahkan mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari besarnya persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan jika dilihat dari penolong proses persalinannya seluruhnya ditolong oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2021 sebesar 90,98 persen yang meningkat menjadi 91,73 persen pada tahun 2022.

Grafik 2.4. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan menurut Karakteristik dan Penolong Persalinan, 2021-2022



Sumber : Susenas, Maret 2021-2022

3 Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

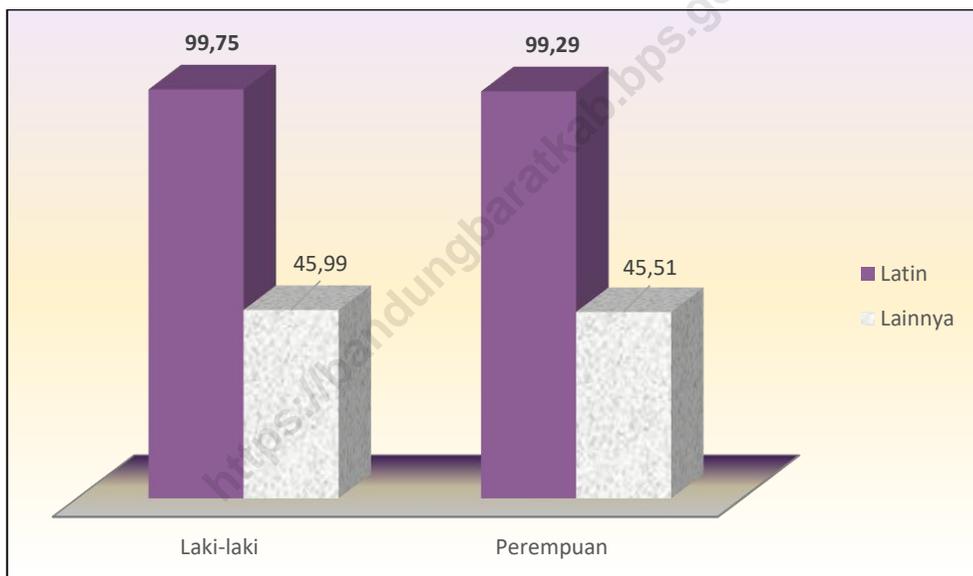
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat baik laki-laki maupun perempuan sudah cukup bagus, hal

ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2022 sudah diatas 99 persen yaitu untuk penduduk laki-laki sebesar 99,75 persen dan penduduk perempuan sebesar 99,29 persen. Sedangkan penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya persentasenya baru diatas 45 persen, penduduk laki-laki sebesar 45,99 persen dan penduduk perempuan sebesar 45,51 persen.

Grafik 3.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis di Kabupaten Bandung Barat, 2022

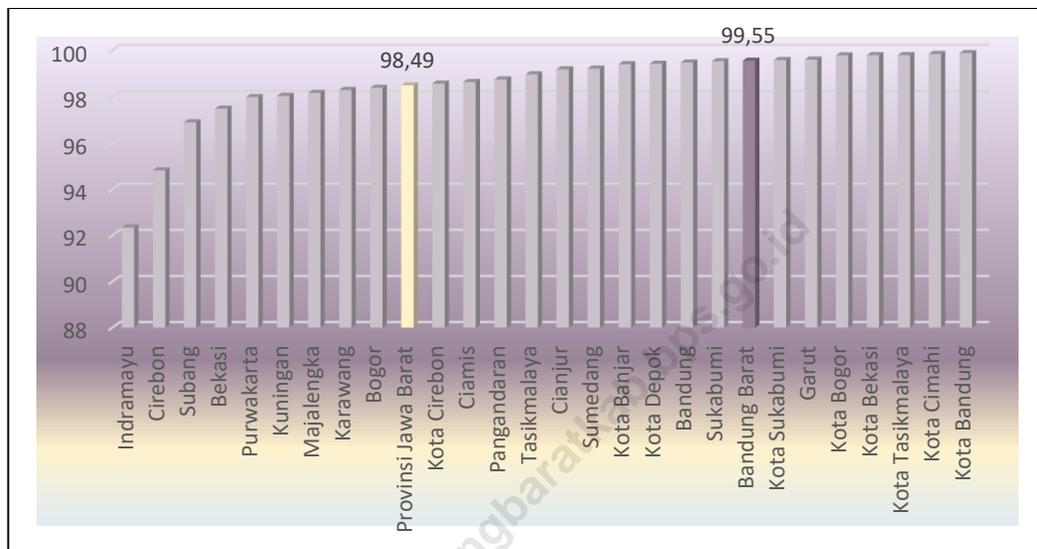


Sumber: Susenas, Maret 2022

Persentase penduduk yang dapat membaca dan atau menulis huruf latin atau huruf lainnya di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data hasil Susenas 2022 sebesar 99,55 persen. Angka melek huruf untuk Kabupaten Bandung Barat cukup tinggi, berada diposisi ke-8 (delapan) se-Jawa Barat dan berada diatas Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan keberhasilan atas usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung

Barat untuk mengurangi angka buta huruf di wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Grafik 3.2. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Persen), 2022



Sumber: Susenas, 2022

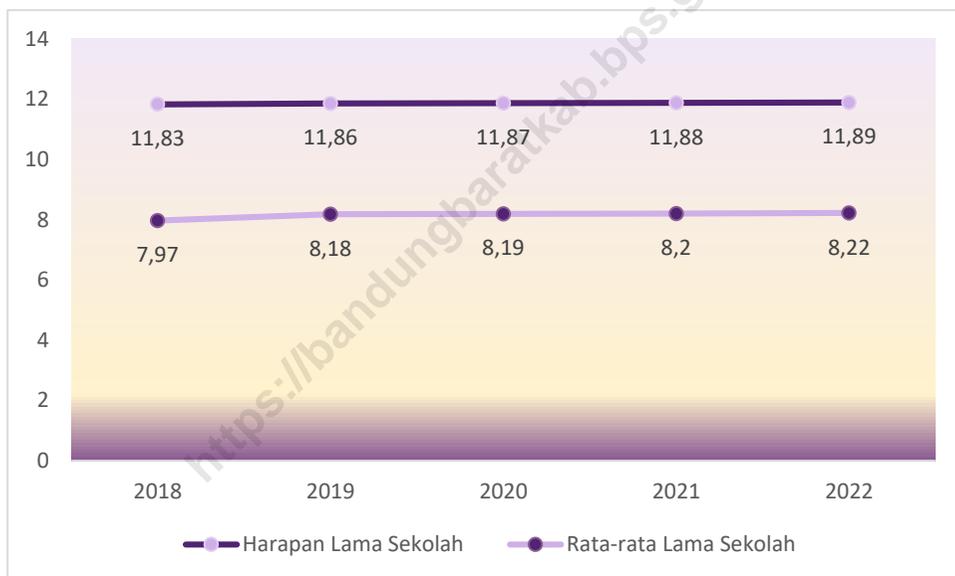
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Sekolah (HLS) menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Selama kurun waktu lima tahun, kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2018 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bandung Barat telah meningkat sebesar 0,06 tahun, dari 11,83 pada tahun 2018 menjadi 11,89 pada tahun 2022. Secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,89 tahun atau setara dengan SMA kelas 3.

Sementara untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama kurun waktu lima tahun dari 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,25 tahun. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik. Hingga tahun 2022, secara rata-rata penduduk Kabupaten Bandung Barat usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau SMP kelas II.

Grafik 3.3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung Barat (Tahun), 2018-2022



Sumber: IPM, 2018-2022

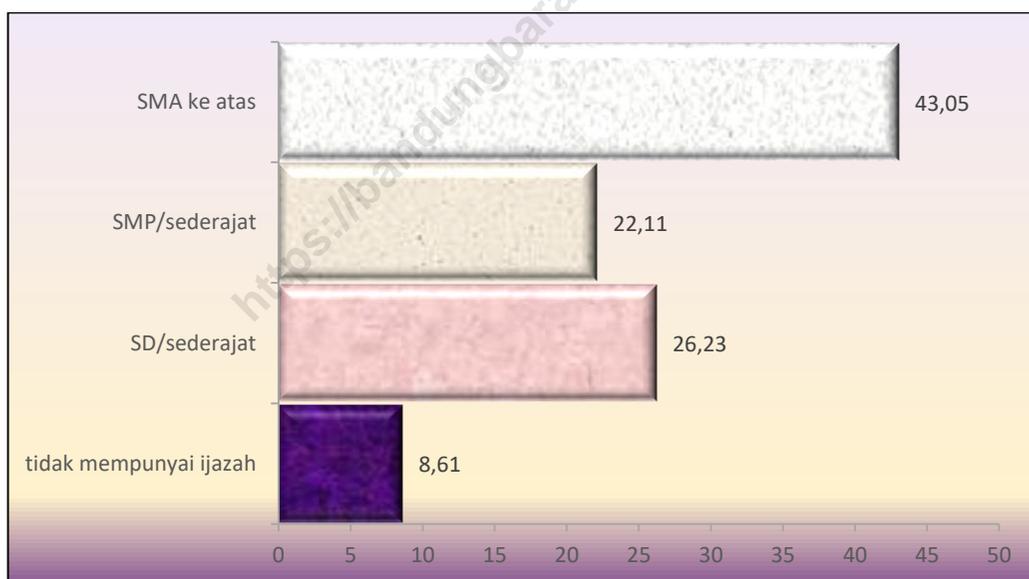
3.3 Tingkat Pendidikan

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas sumber daya

manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan ditandai oleh adanya sertifikat/ijazah. Berdasarkan data hasil Susenas 2022, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat di Kabupaten Bandung Barat adalah kedua besar setelah SMA ke atas yaitu masing-masing sebesar 43,05 persen dan 26,23 persen, dan selanjutnya disusul oleh ijazah SMP/ sederajat yaitu sebesar 22,11 persen. Hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah di bidang pendidikan masih harus terus digalakkan demi tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

Grafik 3.4. Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Barat, 2022



Sumber: Susenas, Maret 2022

Persentase penduduk berumur 7-24 tahun yang masih bersekolah menurut jenis kelamin dan status pendidikan menggambarkan bahwa secara persentase pada kelompok laki-laki maupun perempuan lebih didominasi oleh pendidikan di jenjang SD/ sederajat

yang mencapai lebih dari 30 persen. Kemudian disusul oleh pendidikan di jenjang SMA/ sederajat ke atas yaitu sebesar lebih dari 15 persen.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, 2022

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/sede rajat	SMP/ sederajat	SMA/sede rajat ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,42	33,27	14,13	15,28	36,90	100,0
Perempuan	0,26	36,14	12,94	17,74	32,92	100,0

Sumber: Susenas, Maret 2022

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Peningkatan mutu pendidikan masih terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bandung Barat, 2022

Karakteristik	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	98,88	95,42	62,75
Perempuan	99,29	93,89	68,81
Laki-laki+Perempuan	99,09	94,75	65,67

Sumber: Susenas, Maret 2022

Berdasarkan data Susenas di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022, jika dilihat dari jenis kelamin APS kelompok umur 7-12 dan 16-18 tahun penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Untuk kelompok umur 7-12 tahun masing-masing sebesar 99,29 dan 98,88 persen. Kemudian untuk kelompok umur 16-18 tahun masing-masing sebesar 68,81 dan 62,75 persen. Sedangkan untuk APS kelompok umur 13-15 tahun, APS penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Untuk kelompok umur 13-15 tahun masing-masing sebesar 95,42 dan 93,89 persen. Secara umum penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang berusia 7-12 tahun memiliki kesempatan paling tinggi untuk dapat mengenyam pendidikan dibandingkan dengan kelompok umur 13-15 dan 16-18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu. Angka Partisipasi Murni atau APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP maupun SMA) pada kelompok umur sekolah tertentu yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut. Secara umum di Kabupaten Bandung Barat APM SD dan SMP lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMA, hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD dan SMP. Bisa dikatakan bahwa program wajib belajar untuk pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat cukup berhasil.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, di Kabupaten Bandung Barat, 2022

Karakteristik (1)	SD (2)	SMP (3)	SMA (4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	97,66	73,78	44,58
Perempuan	98,14	78,57	56,58
Laki-laki+Perempuan	97,91	75,87	50,36

Sumber: Susenas, Maret 2022

Pada tabel dapat dilihat nilai APM pada jenjang pendidikan SD masing-masing sebesar 98,14 dan 97,66 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP masing-masing sebesar 78,57 dan 73,78 persen. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMA masing-masing sebesar 56,58 dan 44,58 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada semua jenjang pendidikan, nilai APM untuk perempuan terlihat lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM laki-laki. Pendidikan yang memadai merupakan salah satu persyaratan teknis yang berpengaruh terhadap pencapaian kesempatan kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan dapat memberikan peluang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Hal ini bisa jadi yang mendorong perempuan di Kabupaten Bandung Barat untuk melanjutkan pendidikan.

4 Ketenagakerjaan

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2022 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/ pendapatan bersih.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

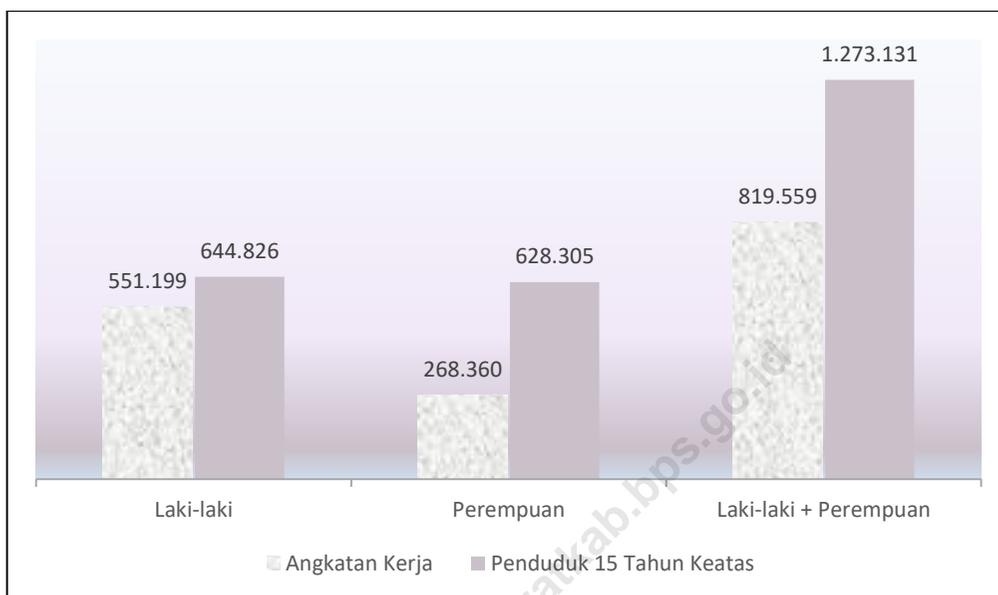
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kabupaten Bandung Barat Agustus 2022 sebanyak 1,27 juta orang. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2022 mencapai 0,82 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 0,45 juta orang atau 36 persen dari penduduk usia kerja.

Di Kabupaten Bandung Barat meskipun dalam semua jenjang pendidikan (SD sampai dengan SMA) APM perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki namun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengindikasikan masih terdapat pekerjaan rumah bagi pemerintah Bandung Barat dalam mewujudkan pembangunan manusia berbasis gender.

Grafik 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun keatas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2022



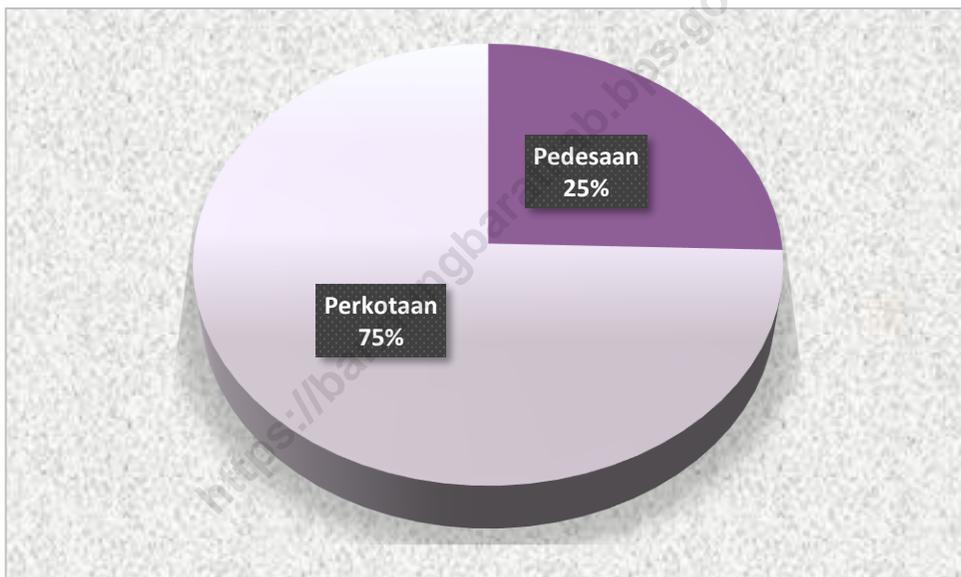
Sumber: Sakernas, Agustus 2022

Berdasarkan hasil Sakernas 2022, angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh penduduk laki-laki. Dari total angkatan kerja sebanyak 819,56 ribu orang sekitar 67,26 persennya berjenis kelamin laki-laki dan sisanya berjenis kelamin perempuan. Pada Agustus 2022, sebanyak 90,37 persen dari angkatan kerja melakukan aktivitas bekerja atau sebanyak 740,64 ribu orang. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

Jika dilihat jumlah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin pada periode Agustus 2022, jumlah penduduk laki-laki sebesar 644,83 ribu orang atau sebesar 50,65 persen dari total jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan untuk perempuan sebesar 628,30 ribu orang atau 49,35 persen dari total penduduk usia kerja.

Jika dilihat menurut wilayah perkotaan dan pedesaan, maka jumlah penduduk bekerja di perkotaan jauh lebih banyak daripada di pedesaan. Pada keadaan Agustus 2022 jumlah penduduk bekerja di perkotaan mencapai 552,08 ribu orang, ada pun di pedesaan hanya sebanyak 188,56 ribu orang.

**Grafik 4.2 Jumlah Penduduk Bekerja menurut Wilayah
Di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2022**

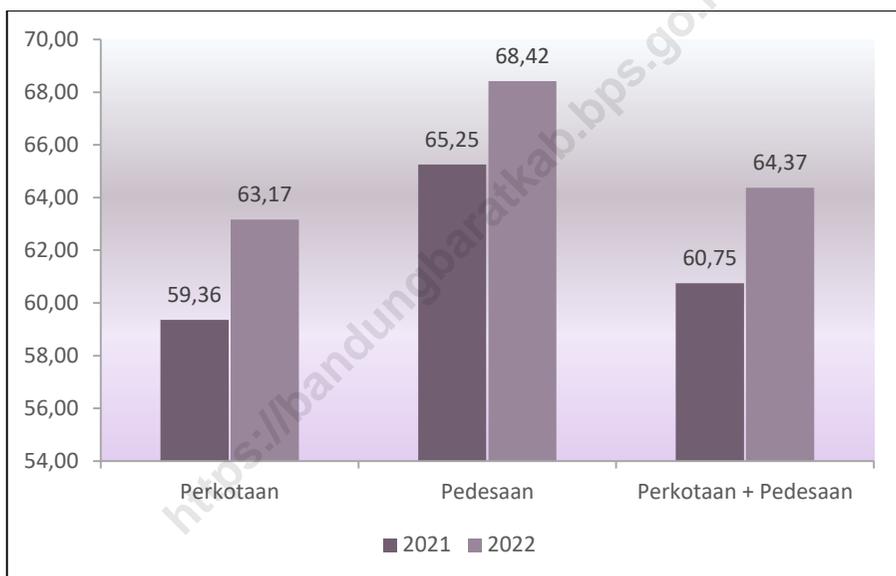


Sumber: Sakernas, Agustus 2022

Dalam jangka waktu 2 tahun terakhir, secara total terdapat peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2021, TPAK sebesar 60,75 persen naik menjadi 64,37 persen pada tahun 2022. Jika dirinci berdasarkan wilayahnya, peningkatan TPAK di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Untuk di perkotaan dari 59,36 persen pada tahun 2021 menjadi 63,17 persen di tahun 2022. Dan di pedesaan dari 65,25 persen pada tahun 2021 menjadi 68,42 persen pada tahun 2022.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Payaman J Simanjuntak, 2005:45).

Grafik 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021 dan 2022

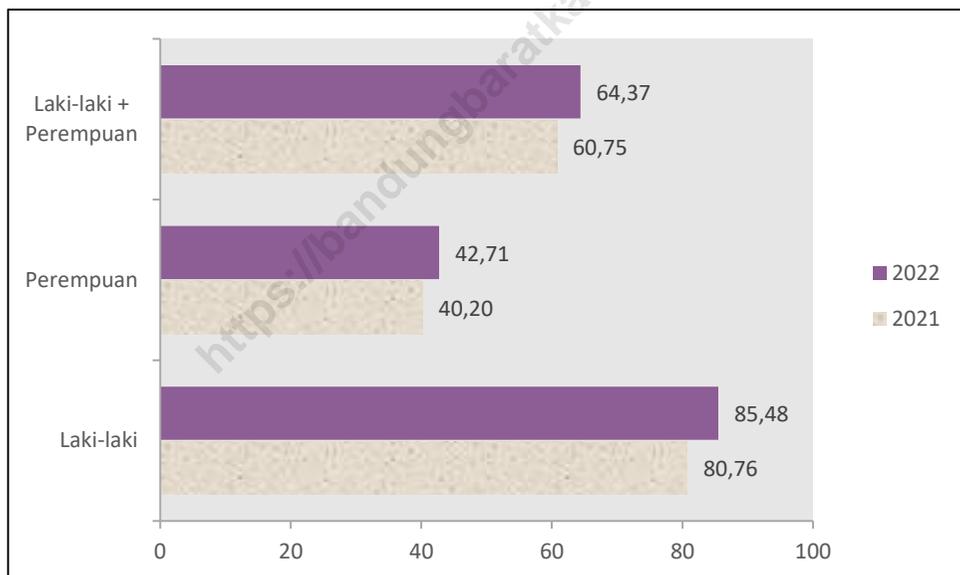


Sumber: Sakernas, Agustus 2021 dan 2022

Adapun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa selama periode Agustus 2021 hingga Agustus 2022, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan Agustus 2021, TPAK laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mencapai 80,76 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya mencapai 40,20 persen.

Secara umum TPAK di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 60,75 persen menjadi 64,37 persen. Begitupun jika dilihat menurut jenis kelamin, baik untuk laki-laki maupun perempuan TPAK tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Hal ini mengindikasikan meningkatnya jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-harinya. Peningkatan TPAK laki-laki memberikan kontribusi paling besar pada peningkatan TPAK secara total di Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan perempuan, yaitu sebesar 4,72 persen. Sedangkan untuk perempuan peningkatannya hanya sebesar 2,51 persen.

Grafik 4.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021 dan 2022



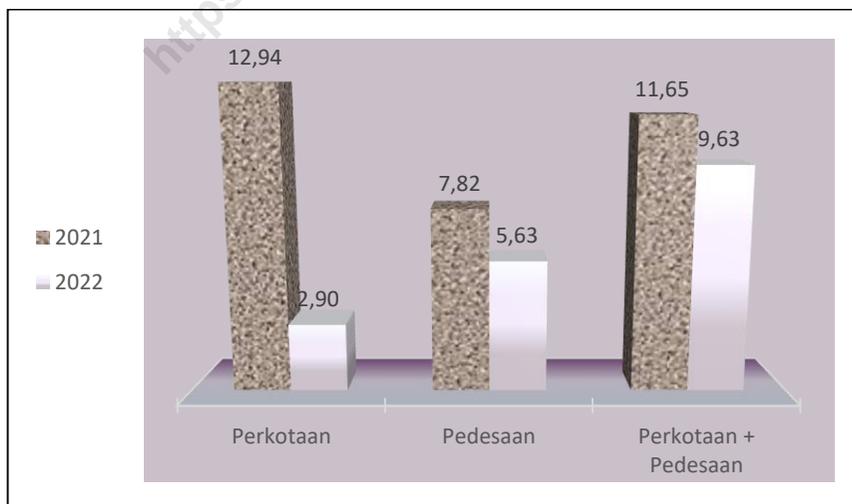
Sumber: Sakernas, Agustus 2021 dan 2022

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) keadaan Agustus 2022 di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan keadaan Agustus 2021, yaitu dari 11,65 persen menjadi 9,63 persen. Begitupun jika dilihat berdasarkan wilayahnya, baik di perkotaan maupun di pedesaan TPT-nya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk wilayah perkotaan dari 12,94 persen pada tahun

2021 menjadi 2,90 persen pada tahun 2022. Dan untuk wilayah pedesaan dari 7,82 persen pada tahun 2021 menjadi 5,63 persen pada tahun 2022.

Penurunan TPT ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat yang terserap pada pasar kerja. Perubahan status dari pandemi ke endemi yang kemudian berangsur ke kondisi normal memicu terjadinya perubahan pada pasar tenaga kerja dan hal ini turut memberikan kontribusi cukup signifikan pada penurunan TPT. Banyak sektor yang aktivitas produksinya mulai kembali normal dengan dicabutnya peraturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pandemi yang sebelumnya terjadi menjadi pendorong bagi pelaku ekonomi untuk mengadopsi teknologi pada tingkatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Untuk dapat bertahan, para pelaku usaha menyesuaikan proses bisnisnya dengan melakukan digitalisasi dan juga mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Grafik 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021 dan 2022



Sumber: Sakernas, Agustus 2021 dan 2022

5 Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Terdapat beberapa definisi tentang pola konsumsi. Pola konsumsi adalah berbagai macam informasi yang memberikan gambaran mengenai jenis, jumlah, dan frekuensi bahan makanan yang dikonsumsi atau dimakan setiap hari oleh kelompok masyarakat tertentu (Baliawati, dkk. 2004). Pendapat lain menyatakan pola konsumsi adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah bahan yang dimakan tiap hari oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok (Handayani, 1994).

Menurut Meiler dan Meineres (1997) penelitian Engel menghasilkan 4 (empat) kesimpulan, yang kemudian dikenal dengan hukum Engel. Keempat butir kesimpulannya adalah: 1) Jika pendapatan meningkat, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi pangan semakin kecil; 2) Persentase pengeluaran untuk konsumsi pakaian relatif tetap dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan; 3) Persentase pengeluaran konsumsi untuk pengeluaran rumah relatif tetap dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan; 4) Jika pendapatan meningkat, maka persentase pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, barang mewah, dan tabungan semakin meningkat.

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Distribusi Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat dalam (Rp), 2022

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)					
	Kurang dari 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	Lebih dari 1.500.000
Makanan	190.316	290.823	412.307	547.110	715.688	1.168.906
Non Makanan	91.727	129.930	212.570	324.703	485.411	1.603.996
Total	282.043	420.754	624.877	871.814	1.201.099	2.772.903

Sumber: Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2022

Tabel 5.1 menyajikan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang dan golongan pengeluaran. Berdasarkan tabel ini terlihat pada golongan kurang dari Rp. 300.000 hingga golongan pengeluaran Rp. 1.000.000 – Rp. 1.499.999 pengeluaran tertinggi adalah pada kelompok makanan dibandingkan dengan non-makanan. Sedangkan untuk golongan pengeluaran Rp. 1.500.000 ke atas pengeluaran untuk kelompok barang makanan dibawah pengeluaran barang non makanan.

6 Perumahan dan Lingkungan

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

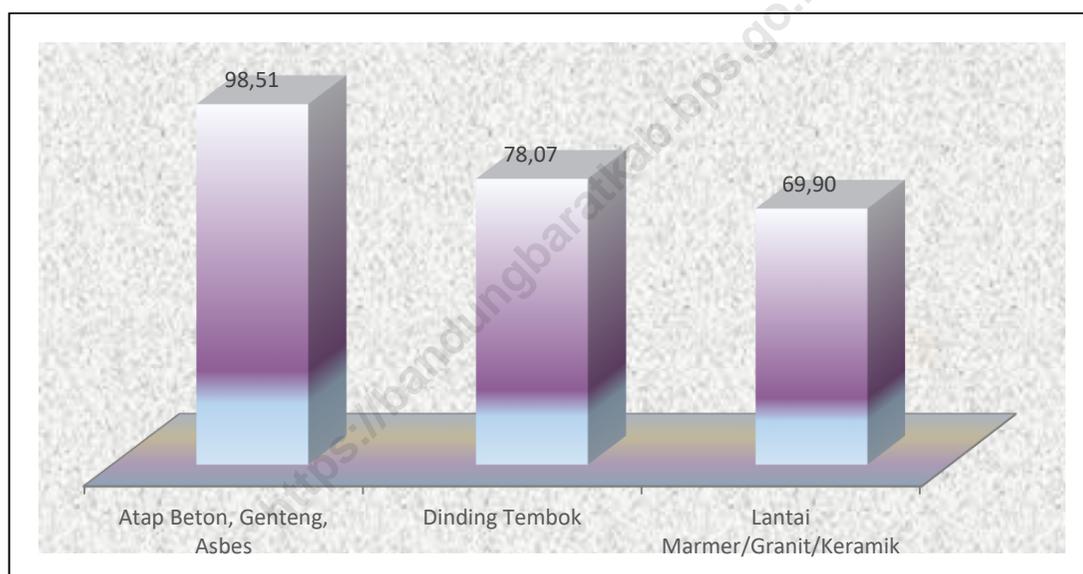
Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga dapat rumah menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut

diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau plesteran anyaman bambu/kawat, dengan beratapkan beton, genteng, maupun asbes. Data hasil Susenas 2022 rumah tangga dengan atap terluas beton, genteng dan asbes mencapai 98,51 persen, sedangkan rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok sebesar 78,07 persen. Untuk lantai terluas di Kabupaten Bandung Barat yaitu marmer/granit/keramik yaitu mencapai 69,90 persen.

Grafik 6.1 Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator-Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Bandung Barat, 2022



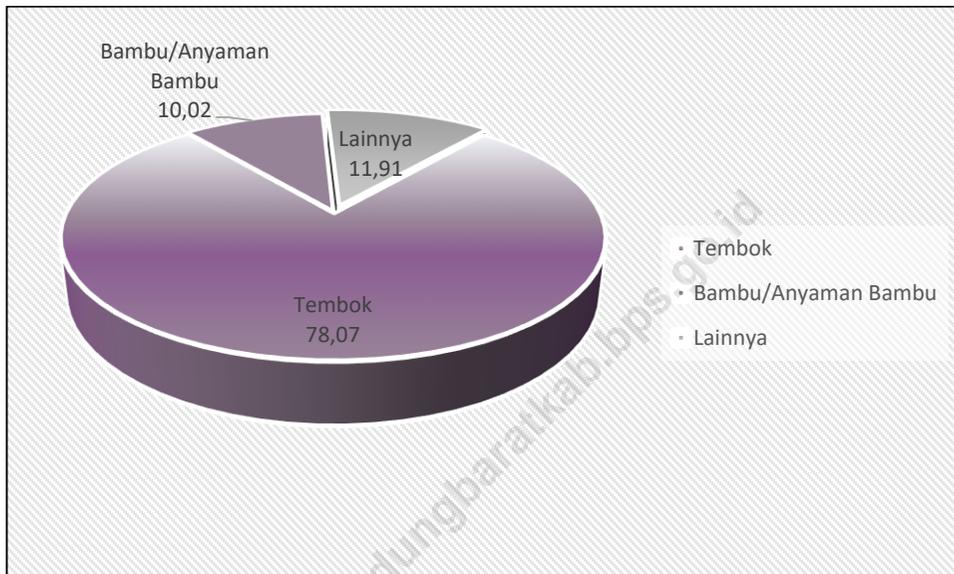
Sumber: Susenas, 2022

Dinding merupakan salah satu komponen penting, karena dinding merupakan penopang bangunan secara keseluruhan. Jenis dinding dapat menunjukkan kualitas tempat tinggal. Tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu dan anyaman bambu merupakan jenis dinding yang baik. Sedangkan batang kayu/bambu atau lainnya merupakan jenis dinding yang buruk karena lembab dan tembus angin.

Data hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa jenis dinding terluas tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh dinding tembok yaitu sebesar 78,07 persen

diikuti oleh jenis dinding bambu/anyaman bambu dan lainnya, masing-masing sebesar 10,02 dan 11,91 persen.

Grafik 6.2 Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas, 2022



Sumber: Susenas, 2022

Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Berkaitan dengan kriteria WHO tersebut, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya.

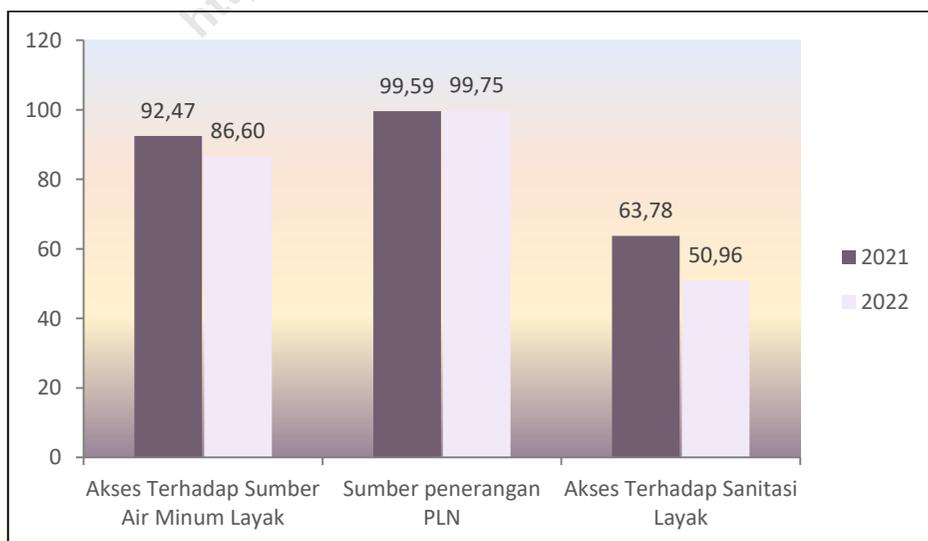
Berdasarkan hasil kajian, rumah yang sehat harus dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kecelakaan termasuk keruntuhan/robah, keracunan dan kebakaran. Salah satunya yang perlu diperhatikan adalah bahan (material) yang digunakan untuk membangun rumah adalah yang berkualitas baik. Bahan bangunan tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat berbahaya bagi kesehatan, tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi

tempat berkembangnya mikroorganisme patogen. Kemudian untuk lantai harus yang kedap air dan mudah dibersihkan. Sedangkan untuk dinding yang paling baik adalah yang tahan api yaitu dinding dari batu bata, karena fungsi dinding ini selain penyangga atap juga untuk melindungi ruangan dari gangguan/serangan hujan, panas dan angin dari luar rumah.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Grafik 6.3. Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2022



Sumber: Susenas, 2021 & 2022

Rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mencapai 86,60 persen, terdapat penurunan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 92,47 persen.

Selain fasilitas ketersediaan air minum yang layak, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Hal ini merupakan kriteria dari sanitasi layak. Selama tahun 2021-2022 persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi layak menurun dari 63,78 persen menjadi 50,96 persen.

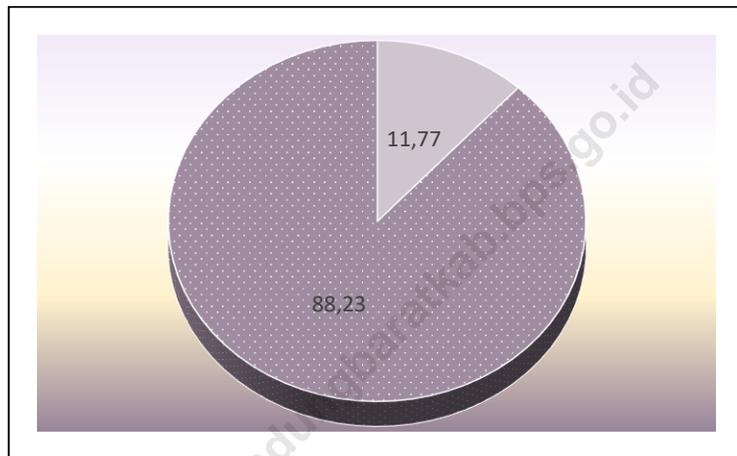
Selain sumber air minum dan sanitasi layak, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah penerangan. Secara umum sumber penerangan yang utama berasal dari listrik baik dari PLN maupun Non PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan bahwa 99,75 persen rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat telah menikmati fasilitas penerangan listrik PLN.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri dan bukan milik sendiri, yang terdiri dari kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik

sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 83,89 persen.

Grafik 6.4 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2022



Sumber: Susenas, 2020

7 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau

tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat secara total menunjukkan tren penurunan selama periode 2018-2022. Tahun 2018, jumlah penduduk miskin sebesar 169,0 ribu jiwa atau 10,04 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Bandung Barat. Angka kemiskinan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi sebanyak 183,7 ribu jiwa atau 9,95

persen dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan keseriusan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menekan angka kemiskinan ini sehingga

angka kemiskinan terus menurun. Namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kondisi peningkatan angka kemiskinan, hal ini diperkirakan terjadi karena adanya pandemi sehingga diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum dan mempengaruhi pendapatan serta konsumsi masyarakat, bahkan sampai kehilangan mata pencahariannya. Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan menjadi 179,5 dan 190,8 ribu jiwa atau 10,47 dan 10,52 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat.

Grafik 7.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2022
(ribu jiwa)



Sumber: Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat, 2018-2022

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting

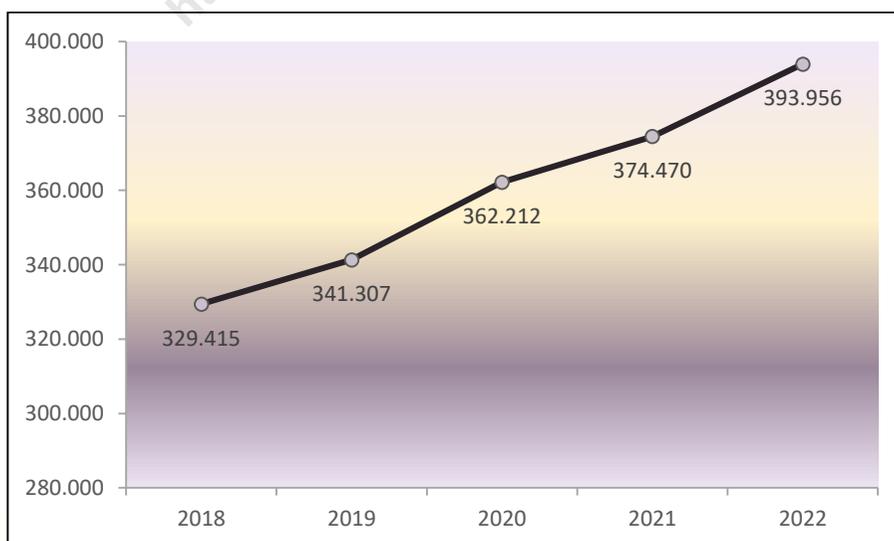
sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

Mereka yang paling merasakan imbas dari adanya pandemi adalah masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah. Pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan pandemi.

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2018-2022, tahun 2018 sebesar Rp 329.415,- dan di tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 341.307,-. Pada tahun 2020 garis kemiskinan mencapai Rp 362.212,-, pada tahun 2021 menjadi Rp 374.470,- dan di tahun 2022 sebesar Rp 393.956,- per bulan.

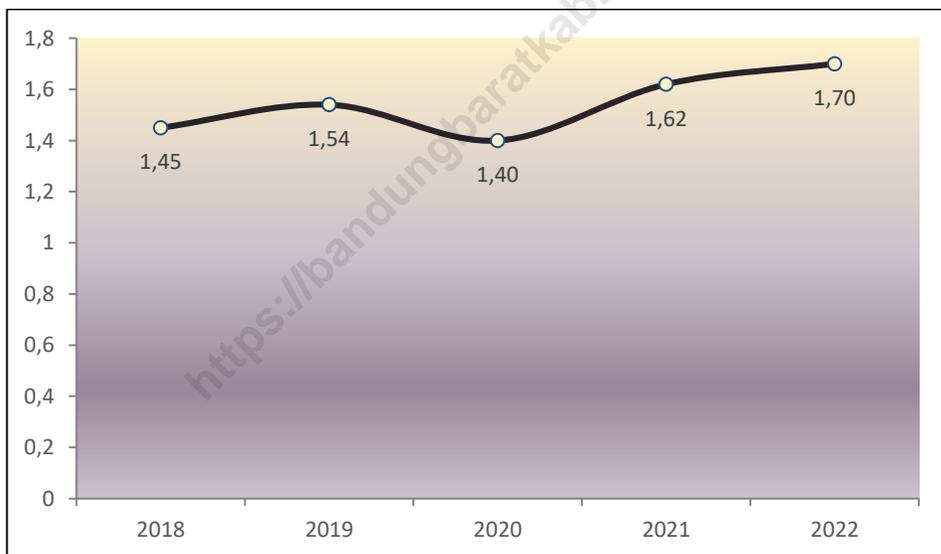
**Grafik 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, 2018 - 2022
(Rupiah/Kapita/Bulan)**



Sumber: Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat, 2018-2022

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2018-2022 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2018 sebesar 1,45 kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 1,54. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 1,40, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 1,62 dan pada tahun 2022 juga meningkat menjadi 1,70. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Grafik 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bandung Barat, 2018 - 2022

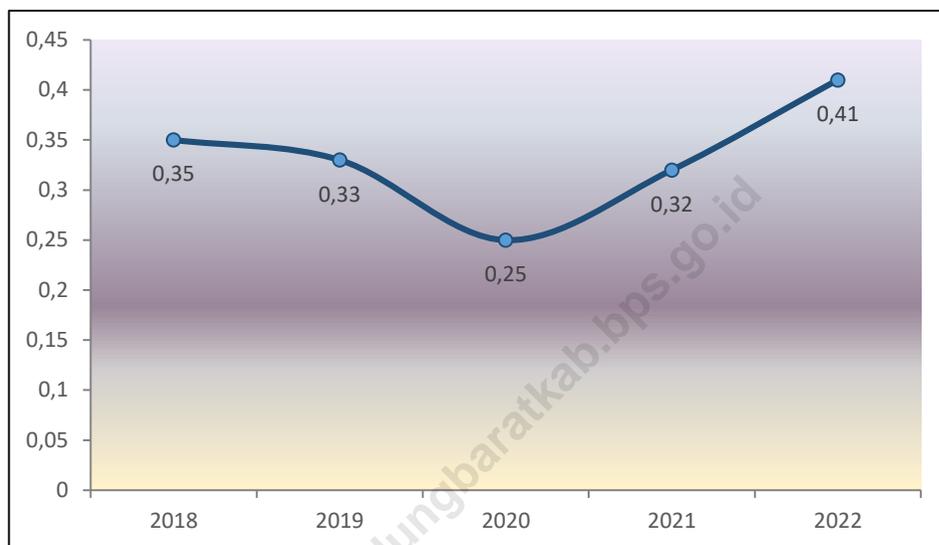


Sumber: Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat, 2018-2022

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 sebesar 0,35 dan terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 0,33 kemudian menurun cukup signifikan di tahun 2020 menjadi 0,25. dan kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 0,32 sampai 0,41. Peningkatan nilai indeks

menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 7.4 Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bandung Barat, 2018 - 2022



Sumber: Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat, 2018-2022

7.3 Karakteristik Pendidikan

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinnya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang memadai maka besar kemungkinan untuk keluar dari kemiskinannya di masa depan.

8 Sosial Lainnya

Pada Bab ini akan diuraikan beberapa data sosial lainnya yang merupakan pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Cakupan pembahasan meliputi data Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis serta Korban Tindak Kejahatan.

8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

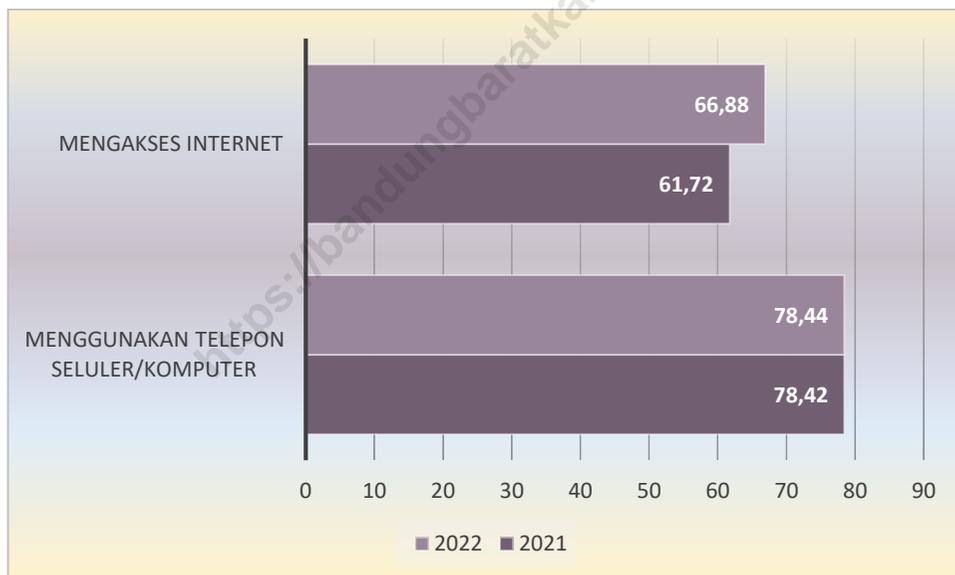
Akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Harga telepon pintar yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Pelayanan kesehatan gratis tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahterannya. Selain itu pula rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas.

Penggunaan internet pada saat ini semakin meluas seiring peningkatan jumlah kepemilikan telepon seluler. Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas alat teknologi informasi

berupa telepon seluler. Saat ini mayoritas penggunaan telepon seluler lebih banyak digunakan selain untuk alat komunikasi juga digunakan untuk mengakses internet. Telepon seluler selain mudah untuk dibawa juga memungkinkan seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas dalam waktu bersamaan. Hal inilah yang membuat penggunaan telepon seluler semakin meningkat terutama dalam mengakses internet dibandingkan dengan perangkat lainnya.

Grafik 8.1. Persentase Penduduk 5 Tahun keatas yang Menggunakan Telepon Seluler/Komputer dan Mengakses Internet di Kabupaten Bandung Barat, 2021-2022



Sumber: Susenas, 2021 & 2022

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler/komputer pada tahun 2022 sebanyak 78,44 persen, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2021 sebesar 78,42 persen. Peningkatan penggunaan telepon seluler/komputer juga diikuti oleh peningkatan persentase penduduk yang mengakses internet dengan

menggunakan berbagai perangkat khususnya penggunaan telepon seluler untuk mengakses internet semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Pada tahun 2022, penduduk yang mengakses internet sebanyak 66,88 persen sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 61,72 persen.

<https://bandungbaratkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— Enlighten The Nation —



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat**

BPS-Statistics of Bandung Barat Regency

Jalan Raya Padalarang No. 763, Bandung Barat 40553;

Telp. (022) 680 4400; Fax. (022) 680 4411;

E-mail: bps3217@bps.go.id; Homepage: <http://bandungbaratkab.bps.go.id>